



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PROVINSI
Sulawesi Selatan

MENURUT PENGELUARAN

2015-2019



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PROVINSI
Sulawesi Selatan

MENURUT PENGELUARAN

2015-2019

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT PENGELUARAN 2015-2019

ISSN : 2597-3959
Katalog BPS : 9302020.73
Nomor Publikasi : 73550.2010
Ukuran Buku : 21,0 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 64 halaman

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Penyunting:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Desain Kover oleh:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Penerbit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Pencetak:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber Ilustrasi: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
MENURUT PENGELUARAN 2015-2019**

Pengarah

Yos Rusdiansyah

Penanggungjawab

Didik Nursetyohadi

Editor

Tini Isywari Hadi

Mujahidah

Penulis

Noor Laila Fadhilasari

Pengolah Data

Noor Laila Fadhilasari

Desain Cover dan Layout

Muhammad Ilham Mubarak

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://sulsel.bps.go.id>

Kata Pengantar

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini telah menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts* 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Makassar, April 2020

**Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan**



Yos Rusdiansyah



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://sulsel.bps.go.id>

Daftar Isi

v	: KATA PENGANTAR
vii	: DAFTAR ISI
viii	: DAFTAR TABEL
ix	: DAFTAR GRAFIK
x	: DAFTAR LAMPIRAN
1	: BAB 1 PENDAHULUAN
3	: 1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto
4	: 1.2 Kegunaan Statistik PDRB
5	: BAB 2 METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA
7	: 2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
9	: 2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT
11	: 2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
13	: 2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
16	: 2.5 Perubahan Inventori
19	: 2.6 Ekspor Impor
21	: BAB 3 TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015-2019
23	: 3.1 Tinjauan Agregat PDRB Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran
26	: 3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
29	: 3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT
29	: 3.4 Konsumsi Akhir Pemerintah
31	: 3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
32	: 3.6 Perkembangan Perubahan Inventori
33	: 3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri
34	: 3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri
35	: 3.9 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah
37	: BAB 4 PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015-2019
39	: 4.1 PDRB (Nominal)
40	: 4.2 Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor
40	: 4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
41	: 4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB
41	: 4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB
42	: 4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor
42	: 4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan
43	: 4.8 Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)
44	: 4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI)
44	: 4.10 Incremental <i>Capital Output Ratio</i> (ICOR)
47	: BAB 5 PENUTUP
51	: LAMPIRAN

Daftar Tabel

- 23 : **Tabel 3.1** PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 24 : **Tabel 3.2** PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 25 : **Tabel 3.3** Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 25 : **Tabel 3.4** Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 26 : **Tabel 3.5** Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 27 : **Tabel 3.6** Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 27 : **Tabel 3.7** Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 28 : **Tabel 3.8** Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 28 : **Tabel 3.9** Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 29 : **Tabel 3.10** Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 30 : **Tabel 3.11** Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 31 : **Tabel 3.12** Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 32 : **Tabel 3.13** Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 32 : **Tabel 3.14** Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 33 : **Tabel 3.15** Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 34 : **Tabel 3.16** Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 39 : **Tabel 4.1** Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 40 : **Tabel 4.2** Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2015-2019
- 40 : **Tabel 4.3** Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2015-2019
- 41 : **Tabel 4.4** Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 41 : **Tabel 4.5** Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2015-2019
- 42 : **Tabel 4.6** Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019
- 42 : **Tabel 4.7** Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 43 : **Tabel 4.8** Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019
- 44 : **Tabel 4.9** Rasio Perdagangan Internasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019
- 45 : **Tabel 4.10** *Incremental Capital Output Ratio*, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

Daftar Grafik

- 24 : **Grafik 3.1** Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

<https://sulsel.bps.go.id>

Daftar Lampiran

- 57 : **Lampiran 1** Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019
- 58 : **Lampiran 2** Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019
- 59 : **Lampiran 3** Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019
- 60 : **Lampiran 4** Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019
- 61 : **Lampiran 5** Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019
- 62 : **Lampiran 6** Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN

<https://sulsel.bps.go.id>



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://sulsel.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1.1. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

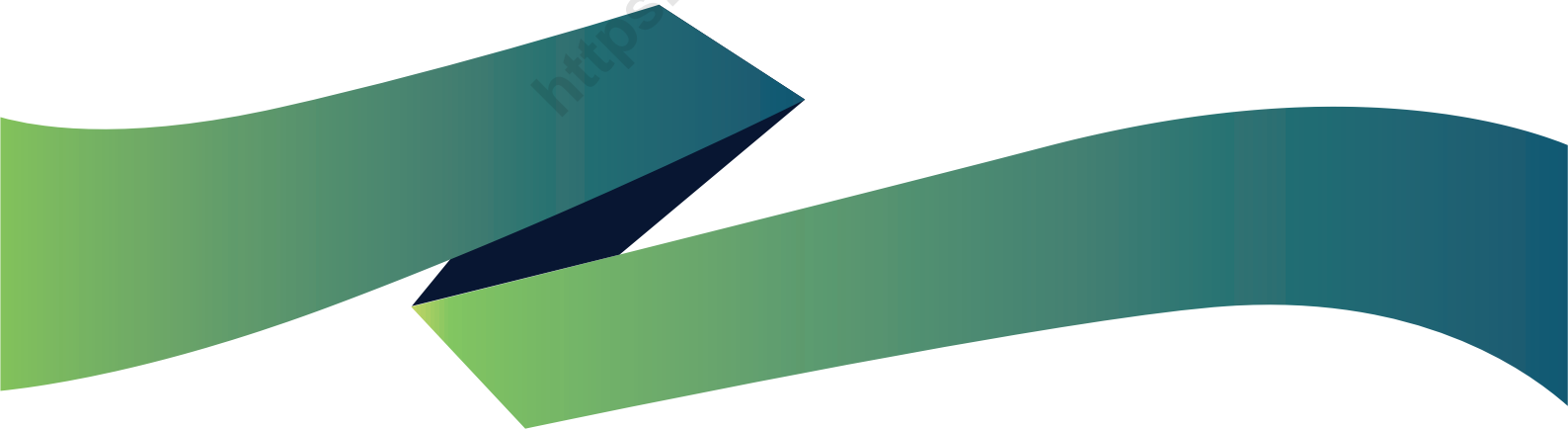
Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan komunikasi konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB 2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://sulsel.bps.go.id>



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://sulsel.bps.go.id>

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok

2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

1. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
2. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
3. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
4. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

1. Pembelian langsung oleh non-residen diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
2. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
3. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh: pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
4. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode perhitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:

- a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
- b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-adjust;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

1. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;

2. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
3. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
4. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
5. Istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, terlibat dalam produksi non-pasar, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. Dalam *Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Housholds* (COPNI), LNPRT diklasifikasikan berdasarkan kegiatan utama lembaga menjadi 9 jenis lembaga, yaitu: perumahan, kesehatan, rekreasi dan kebudayaan, pendidikan, jaminan social, keagamaan, partai politik/organisasi buruh/organisasi profesi, lingkungan hidup, dan jasa-jasa. Namun terkait ketersediaan data, LNPRT di Indonesia dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

1. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
2. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
3. Penyusutan
4. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SK-LNP).

Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

- Hasil up-dating direktori LNPRT.

Informasi yang diperoleh dari hasil up-dating direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Sulawesi Selatan, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa melalui kegiatan seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Menurut jenisnya, pengeluaran pemerintah dibagi menjadi 2:

1. Konsumsi Kolektif, yaitu kegiatan konsumsi pemerintah dalam rangka menghasilkan layanan masyarakat yang dinikmati secara kolektif, seperti bidang pelayanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum.
2. Konsumsi individu, yaitu kegiatan konsumsi pemerintah dalam rangka menghasilkan layanan masyarakat yang dinikmati secara individu oleh masyarakat penerima layanan, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pariwisata dan budaya.

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Perhitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)

- d. Output Bank Sulawesi Selatan (BI)
 - e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.
2. Metode Perhitungan
- a. PKP Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

PK-P adh berlaku =

Output non pasar – penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu: belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level provinsi, PK-P provinsi adh berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

- b. PKP Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam, pencurian atau kecelakaan tidak dicatat sebagai pengurangan barang modal.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah “bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Perhitungan PMTB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Pengalihan (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode Perhitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan

produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “*arus komoditas*”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (*adh*) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai *adh* berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB *adh* konstan, maka PMTB *adh* berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik *adh* berlaku maupun *adh* konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkut dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB *adh* Berlaku. Untuk memperoleh nilai *adh* Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (*adh* berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB *adh* konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB *adh* konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB *adh* berlaku, nilai PMTB *adh* konstan tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB *adh* konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB *adh* berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkut dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB *adh* konstan adalah dengan cara men-“*deflate*” PMTB *adh* berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB *adh* berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan *adh* berlaku dari aktivitas

pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh konstannya diperoleh dengan mendeflate nilai adh berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh konstan diperoleh dengan mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi

pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
2. Berbagai jenis bahan baku & penolong (material & supplies), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
3. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
4. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
6. Ternak untuk tujuan dipotong;
7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
8. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti: beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Perhitungan Perubahan Inventori

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung perubahan inventori adalah:

- a. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh website Bursa Efek Sulawesi Selatan (www.idx.co.id);
- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- c. Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- e. Data komoditas perkebunan;
- f. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- h. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Sulawesi Selatan (ASI), gula dari Dewan Gula Sulawesi Selatan (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Perhitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori *adh berlaku*, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- Menghitung posisi inventori *adh konstan*, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori *adh konstan* dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- Menghitung perubahan inventori *adh berlaku* dengan menginflatae perubahan inventori *adh konstan* dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori *adh berlaku* diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori *adh konstan* dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori *adh berlaku* dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.5. EKSPOR IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

1. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
2. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

3. Net Ekspor antar daerah

- Ekspor antar daerah
- Impor antar daerah

iv. Perhitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung ekspor impor adalah:

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Sulawesi Selatan dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Sulawesi Selatan

2. Metode Perhitungan

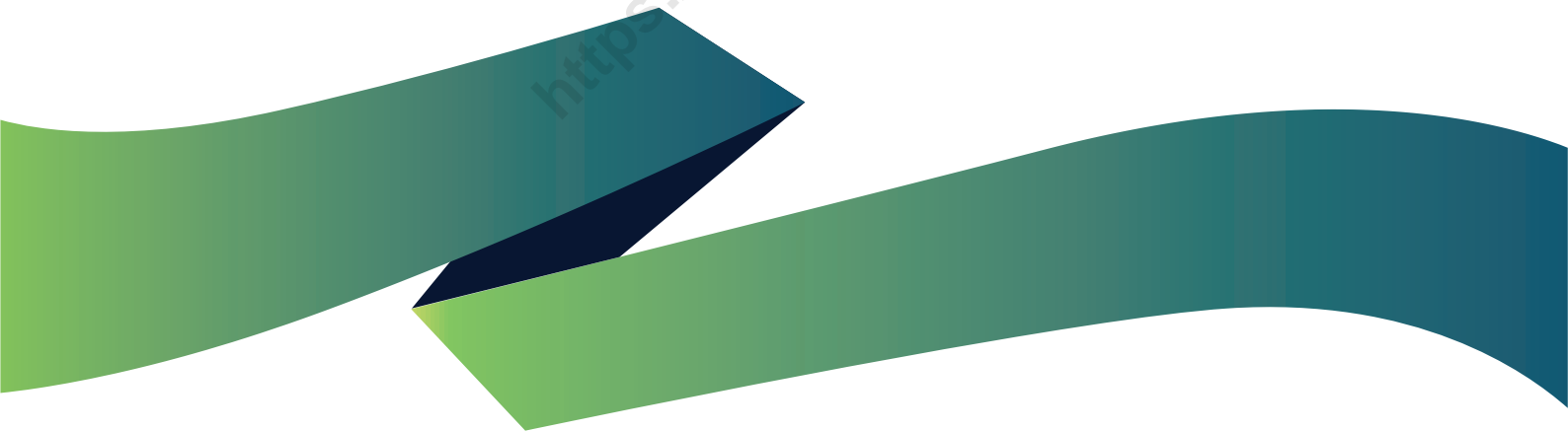
Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$.

Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Sulawesi Selatan (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Sulawesi Selatan. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB 3

TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN BERDASARKAN
PDRB PENGELUARAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2015-2019



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://sulsel.bps.go.id>

TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 – 2019

Perubahan struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2015 s.d 2019, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Sulawesi Selatan sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPR, dan pemerintah) dan sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1. TINJAUAN AGREGAT PDRB SULAWESI SELATAN MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Sulawesi Selatan 2019 meningkat cukup baik. Secara umum perekonomian terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga terus menunjukkan arah yang positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB menurut harga berlaku maupun harga konstan setiap komponen, juga nilai total PDRB. Peningkatan konsumsi rumah tangga menggambarkan perekonomian rumah tangga yang kian membaik. Begitu pula konsumsi LNPR dan Pemerintah yang meningkat menunjukkan kemampuan institusi tersebut dalam membiayai keperluan konsumsinya dengan lebih baik. Investasi dan ekspor yang meningkat merupakan implikasi dari peningkatan pendapatan dari kegiatan produksi.

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Komponen Pengeluaran (1)	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	185.585,54	204.368,75	225.404,55	251.147,50	274.463,64
2. Konsumsi LNPR	4.265,90	4.626,45	5.109,72	6.145,46	8.699,58
3. Konsumsi Pemerintah	36.396,62	37.399,19	39.393,17	44.827,51	49.429,29
4. PMTB	125.989,17	141.414,70	157.246,49	171.943,70	188.411,40
5. Perubahan Inventori	5.641,24	4.848,29	1.821,01	2.422,13	289,52
6. Ekspor Luar Negeri	20.159,34	17.850,66	18.207,51	23.648,31	25.109,98
7. Impor Luar Negeri	13.365,44	12.998,05	16.153,14	12.254,65	12.713,74
8. Net Ekspor Antar Daerah	-24.282,16	-20.401,10	-15.441,11	-26.160,48	-28.942,80
Total PDRB	340.390,21	377.108,91	415.588,20	461.719,49	504.746,87

Catatan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Nilai PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku (adhb) selama periode tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2019 telah mencapai angka sekitar 505 triliun. Peningkatan nilai tersebut selain karena peningkatan volume konsumsi juga dipengaruhi oleh adanya perubahan harga.

Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

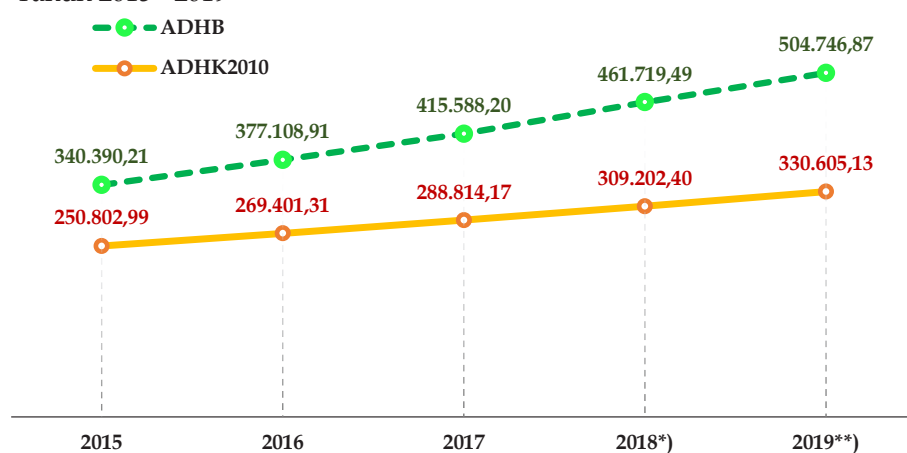
Miliar Rupiah

Komponen Pengeluaran (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	134.421,20	141.791,48	150.507,11	160.726,18	171.693,40
2. Konsumsi LNPRT	2.950,59	3.046,76	3.254,76	3.764,85	5.114,63
3. Konsumsi Pemerintah	25.407,42	25.066,64	25.746,96	27.346,39	29.251,41
4. PMTB	96.963,27	103.857,19	112.387,27	118.819,80	125.557,71
5. Perubahan Inventori	4.659,78	3.330,64	1.388,36	1.362,98	332,04
6. Ekspor Luar Negeri	16.703,58	13.095,03	12.948,17	15.893,52	17.545,19
7. Impor Luar Negeri	10.240,27	10.023,62	12.400,75	8.189,25	8.055,90
8. Net Ekspor Antar Daerah	-20.062,59	-10.762,80	-5.017,70	-10.522,06	-10.833,35
Total PDRB	250.802,99	269.401,31	288.814,17	309.202,40	330.605,13

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan (adhk) 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adhk, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adhk menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2015-2019, gambaran tentang perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan berdasarkan PDRB adhk dapat dilihat pada tabel 2 di atas. Sama halnya dengan PDRB adhb, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adhk juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Gambar 3.1 Perbandingan PDRB adhb dan adhk 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 - 2019



Dari grafik di atas, nampak jelas bahwa pada umumnya nilai PDRB adhb selalu lebih besar dari nilai PDRB adhk. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adhb. Semakin lama selisih antara PDRB adhb dan adhk semakin jauh karena peningkatan harga dari tahun ke tahun. Dalam PDRB adhk pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto atau ekspor dikurangi impor (X-M).

Tabel 3.3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019
(Persen)

Komponen Pengeluaran (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	54,52	54,19	54,24	54,39	54,38
2. Konsumsi LNPRT	1,25	1,23	1,23	1,33	1,72
3. Konsumsi Pemerintah	10,69	9,92	9,48	9,71	9,79
4. PMTB	37,01	37,50	37,84	37,24	37,33
5. Perubahan Inventori	1,66	1,29	0,44	0,52	0,06
6. Ekspor Luar Negeri	5,92	4,73	4,38	5,12	4,97
7. Impor Luar Negeri	3,93	3,45	3,89	2,65	2,52
8. Net Ekspor Antar Daerah	-7,13	-5,41	-3,72	-5,67	-5,73
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode 2015 – 2019, produk yang dikonsumsi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50 persen). Besarnya porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut merupakan faktor pendorong utama besarnya permintaan barang dan jasa. Pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 37-38 persen. Sementara itu, perdagangan internasional Sulawesi Selatan yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor luar negeri dan impor luar negeri. Selama periode tersebut, nilai ekspor luar negeri selalu lebih tinggi dari impor luar negeri. Namun, perdagangan antar wilayah mengalami defisit, dimana impor dari luar provinsi lebih besar dibandingkan ekspor keluar provinsi. Dilihat dari kontribusinya, peran ekspor luar negeri terhadap PDRB menurun dibandingkan tahun 2018 dari 5,12 persen menjadi 4,97 persen. Sedangkan peran impor luar negeri sebagai komponen pengurang PDRB sedikit mengalami penurunan dari 2,65 persen menjadi 2,52 persen. Adapun proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 9 - 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019
(Persen)

Komponen Pengeluaran (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,29	5,48	6,15	6,79	6,82
2. Konsumsi LNPRT	1,13	3,26	6,83	15,67	35,85
3. Konsumsi Pemerintah	8,09	-1,34	2,71	6,21	6,97
4. PMTB	8,08	7,11	8,21	5,72	5,67
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	-7,57	-21,60	-1,12	22,75	10,39
7. Impor Luar Negeri	28,43	-2,12	23,72	-33,96	-1,63
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
Total PDRB	7,19	7,42	7,21	7,06	6,92

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dari tahun 2015 - 2019 secara rata-rata mencapai 7,16 persen, yang apabila dilihat trennya melambat. Masing-masing pertumbuhannya sebesar 7,19 persen (2015); 7,42 persen (2016); 7,21 persen (2017); 7,06 persen (2018); dan 6,92 persen (2019). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 7,42 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2019 (6,92 persen).

Tabel 3.5 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 - 2019

Komponen Pengeluaran (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	138,06	144,13	149,76	156,26	159,86
2. Konsumsi LNPRT	144,58	151,85	156,99	163,23	170,09
3. Konsumsi Pemerintah	143,25	149,20	153,00	163,92	168,98
4. PMTB	129,93	136,16	139,91	144,71	150,06
5. Perubahan Inventori	121,06	145,57	131,16	177,71	87,19
6. Ekspor Luar Negeri	120,69	136,32	140,62	148,79	143,12
7. Impor Luar Negeri	130,52	129,67	130,26	149,64	157,82
8. Net Ekspor Antar Daerah	121,03	189,55	307,73	248,63	267,16
Total PDRB	135,72	139,98	143,89	149,33	152,67

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Hal ini berarti bahwa dari tahun ke tahun kenaikan harga semakin tinggi.

3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana lebih dari 50 persen produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015 - 2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adhb) maupun riil (adhk), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Kenaikan konsumsi rumah tangga pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2015 - 2019 relatif stabil meski ada sedikit naik turun. Pada tahun 2015 porsinya sekitar 54,52 persen, kemudian tahun 2019 porsinya masih sekitar 54,38 persen.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut adhb maupun adhk 2010. Menurut harga berlaku pada tahun 2015, secara umum setiap rumah tangga di Sulawesi Selatan menghabiskan dana sekitar Rp 94,85 juta setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat hingga pada tahun 2019 menjadi Rp 135,06 juta.

¹Indeks Perkembangan

Tabel 3.6 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 – 2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	185.585,54	204.368,75	225.404,55	251.147,50	274.463,64
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	134.421,20	141.791,48	150.507,11	160.726,18	171.693,40
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	54,52	54,19	54,24	54,39	54,38
Rata-rata konsumsi per Rumah Tangga/ tahun (Ribuan Rp)					
a. ADHB	94.851,38	103.412,40	112.960,90	124.696,33	135.059,06
b. ADHK 2010	68.701,67	71.747,75	75.426,24	79.801,57	84.487,51
Rata-rata konsumsi per-kapita/ tahun (Ribuan Rp)					
a. ADHB	21.781,56	23.746,21	25.937,51	28.630,68	31.008,50
b. ADHK 2010	15.776,57	16.475,17	17.318,99	18.322,70	19.397,67
Pertumbuhan²					
a. Total konsumsi RT	5,29	5,48	6,15	6,79	6,82
b. Konsumsi Per-RT	4,34	4,43	5,13	5,80	5,87
c. Konsumsi Perkapita	4,20	4,43	5,12	5,80	5,87
Jumlah RT (Ribuan Rupa)	1.957	1.976	1.995	2.014	2.032
Jumlah penduduk (Ribuan Org)	8.520	8.606	8.690	8.772	8.851

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Pada adhk 2010, rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh pada kisaran 5,11 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,87 persen. Sementara itu, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Peningkatan rata-rata konsumsi perkapita secara “riil” berkisar antara 4 - 7 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adhk sebesar 5,29 persen pada tahun 2015. Selanjutnya meningkat menjadi 5,48 persen (2016); 6,15 persen (2017); 6,79 persen (2018); dan 6,82 persen (2019). Demikian pula pertumbuhan konsumsi perkapita yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya hanya sekitar 1 persen. Secara umum hal ini menunjukkan terjadinya perubahan tingkat kemakmuran masyarakat secara rata-rata, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 3.7 Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 – 2019³

Kelompok Konsumsi (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	43,61	44,53	44,68	44,49	45,07
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,78	4,79	4,75	4,71	4,69
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,59	9,50	9,51	9,37	9,01
d. Kesehatan & Pendidikan	10,30	10,17	10,13	10,53	10,48
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	21,90	21,11	21,20	21,30	21,40
f. Hotel & Restoran	5,36	5,40	5,29	5,27	4,95
g. Lainnya	4,47	4,49	4,45	4,34	4,41
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)
³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Dari tabel 3.7 di atas terlihat bahwa dari tahun 2015 – 2019 struktur konsumsi akhir rumah tangga Sulawesi Selatan, konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Pola proporsi ini tampak cukup stabil, dimana proporsi pengeluaran untuk makanan berada pada kisaran di bawah 50 persen, yaitu 43,61 persen (2015); 44,53 persen (2016); 44,68 persen (2017); 44,49 persen (2018); dan 45,07 persen (2019). Tidak dipungkiri, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan sosial ekonomi dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya. Namun demikian, konsumsi makanan tetap menjadi kebutuhan pokok yang tak berkurang pentingnya. Sehingga pemenuhan kebutuhan non makanan ditingkatkan tanpa harus mengurangi konsumsi makanan.

Tabel 3.8 Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 – 2019 (Persen)

Kelompok Konsumsi (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,03	5,38	5,76	7,11	7,36
NON-MAKANAN:	5,50	5,57	6,46	6,54	6,39
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,83	4,99	6,69	4,53	2,74
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,92	5,03	5,80	4,82	2,99
d Kesehatan & Pendidikan	5,59	4,67	6,90	7,96	5,75
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,58	6,10	6,94	7,89	9,99
f. Hotel & Restoran	6,48	7,08	5,44	4,34	-0,24
g. Lainnya	4,62	4,76	5,17	4,22	6,84

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Data pada tabel 3.8 menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat meningkat positif dari tahun ke tahun, baik konsumsi makanan maupun non makanan. Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, dalam kurun waktu 2015-2019 pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,13 persen per tahun, sedangkan pengeluaran non makanan meningkat rata-rata 6,09 persen per tahun. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun tidak pada semua kelompok masyarakat, hanya kelompok tertentu yang dapat menikmatinya.

Tabel 3.9 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 – 2019⁴ (Persen)

Kelompok Konsumsi (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,49	6,70	4,64	3,57	3,12
NON-MAKANAN:	7,08	3,79	3,22	5,38	3,00
b. Pakaian dan Alas Kaki	6,78	5,26	2,42	5,74	5,88
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,71	3,93	4,29	4,72	2,04
d Kesehatan & Pendidikan	8,04	3,92	2,74	7,30	2,89
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,53	0,08	3,54	3,77	-0,19
f. Hotel & Restoran	7,51	3,62	2,46	6,40	2,79
g. Lainnya	8,76	5,56	3,92	4,21	4,04

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Sementara itu, tingkat perubahan harga secara implisit yang disajikan dalam tabel 9, selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga ini cenderung mengecil untuk kelompok pengeluaran makanan maupun non makanan selama 2015-2019. Pertumbuhan implisit di tahun 2019 mencapai 3,12 persen untuk kelompok makanan dan 3 persen untuk kelompok non makanan. Hal ini menunjukkan tingkat perubahan harga yang semakin rendah. Rendahnya tingkat kenaikan harga non-makanan terutama karena kontribusi dari biaya transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya yang kenaikan harganya juga cenderung mengecil.

3.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana proporsinya terhadap PDRB yang minor.

Tabel 3.10 Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 – 2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	4.265,90	4.626,45	5.109,72	6.145,46	8.699,58
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.950,59	3.046,76	3.254,76	3.764,85	5.114,63
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,25	1,23	1,23	1,33	1,72

Catatan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Walaupun proporsi Konsumsi LNPRT terhadap PDRB relatif kecil, namun konsumsi LNPRT di Sulawesi Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut adhb maupun adhk 2010. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi LNPRT terhadap PDRB cenderung stabil dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi LNPRT terus meningkat karena pada tahun 2019 merupakan tahun dilaksanakannya pemilu. Partai politik semakin gencar melakukan kegiatan kampanye, begitu pula ormas-ormas pendukung capres-cawapres atau partai tertentu semakin menggiatkan aktivitasnya. Di tahun 2019 pertumbuhan riil konsumsi LNPRT telah mencapai 35,85 persen.

3.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adhb menunjukkan peningkatan. Di tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menurut harga berlaku sebesar Rp 36,40 triliun, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai Rp 49,43 triliun. Sementara itu, menurut harga konstan 2010 konsumsi akhir pemerintah mengalami tren meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2019, meskipun sempat menurun pada tahun 2016 sebesar 1,34 persen. Hal ini berarti bahwa peningkatan konsumsi pemerintah yang terjadi di tahun 2016 adalah pengaruh kenaikan harga, sedangkan secara riil konsumsi pemerintah menurun.

Pengeluaran akhir pemerintah memiliki kontribusi 9,79 persen dari PDRB menurut pengeluaran yang trennya sedikit menurun. Di tahun 2015 proporsinya masih 10,69 persen dan

Tabel 3.11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 - 2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	36.396,62	37.399,19	39.393,17	44.827,51	49.429,29
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	25.407,42	25.066,64	25.746,96	27.346,39	29.251,41
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	10,69	9,92	9,48	9,71	9,79
Konsumsi Pemerintah perkapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	4.271,75	4.345,52	4.533,01	5.110,31	5.584,45
b. ADHK 2010	2.981,99	2.912,57	2.962,73	3.117,47	3.304,78
Pertumbuhan⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	8,09	-1,34	2,71	6,21	6,97
b. Konsumsi perkapita	6,98	-2,33	1,72	5,22	6,01
Jumlah penduduk (ribu orang)	8.520	8.606	8.690	8.772	8.851

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

di tahun 2019 menjadi 9,79 persen. Proporsi ini menempati urutan ketiga dalam PDRB menurut pengeluaran setelah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

Pengeluaran pemerintah sering kali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah perkapita adhb sebesar Rp 5,58 juta (lihat tabel 3.11). Konsumsi pemerintah perkapita ini menggambarkan besarnya layanan yang telah diberikan pemerintah kepada setiap penduduk selama satu tahun. Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup stabil dan terkontrol serta peningkatan konsumsi pemerintah yang cukup baik, konsumsi pemerintah perkapita searah dengan peningkatan dan penurunan pengeluaran konsumsi pemerintah secara total. Maka hal yang perlu diperhatikan pemerintah adalah selalu berupaya mengoptimalkan pengeluaran konsumsi akhir agar output layanan kepada masyarakat dapat terus meningkat.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" menunjukkan fluktuasi baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Di tahun 2015 terjadi lonjakan konsumsi akhir pemerintah yang cukup signifikan mencapai 8,09 persen. Kemudian pada tahun 2016 terjadi pertumbuhan minus 1,34 persen. Tahun 2017 kembali tumbuh positif 2,71 persen; di 2018 tumbuh semakin tinggi pada level 6,21 persen; dan di tahun 2019 tumbuh positif menjadi 6,97 persen.

Nilai konsumsi pemerintah perkapita memiliki pola yang sama dengan konsumsi pemerintah secara total, mengalami fluktuasi pada tahun 2015 - 2019. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan pengeluaran akhir pemerintah perkapita yang tumbuh positif di tahun 2015, namun tumbuh negatif di tahun 2016, dan tumbuh positif kembali di tahun 2017, 2018 dan 2019.

Menurut strukturnya, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif seperti kegiatan pemerintah di bidang pelayanan publik, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum. Di atas 50 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 3.12). Namun proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah perlahan menurun. Pada tahun 2015 proporsinya mencapai 56,39 persen dan di tahun 2019 menjadi 55,40 persen.

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)

Tabel 3.12 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 - 2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah⁶					
a. Konsumsi Kolektif (Miliar Rp)	20.524,65	20.987,03	21.985,56	25.160,33	27.381,73
(%)	56,39	56,12	55,81	56,13	55,40
b. Konsumsi Individu (Miliar Rp)	15.871,96	16.412,17	17.407,61	19.667,17	22.047,56
(%)	43,61	43,88	44,19	43,87	44,60
Total Konsumsi (Miliar Rp)	36.396,62	37.399,19	39.393,17	44.827,51	49.429,29
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan riil (adhk 2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	6,87	-1,58	2,68	7,10	4,95
b. Konsumsi Individu	9,81	-1,01	2,76	5,01	9,76
Total Konsumsi	8,09	-1,34	2,71	6,21	6,97
Pertumbuhan indeks harga (%) implisit⁷					
a. Konsumsi Kolektif	5,90	3,90	2,02	6,85	3,70
b. Konsumsi Individu	5,97	4,46	3,22	7,59	2,14
Total Konsumsi	5,97	4,15	2,55	7,14	3,08

Catatan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Sekitar 43-45 persen konsumsi pemerintah digunakan untuk konsumsi individu, yaitu konsumsi untuk kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pariwisata dan budaya. Konsumsi individu secara nominal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 3.12). Berlawanan dengan konsumsi kolektif, proporsi konsumsi individu terhadap total konsumsi pemerintah pada periode 2015-2019 sedikit meningkat. Pada tahun 2015 proporsinya mencapai 43,61 persen dan di tahun 2019 menjadi 44,60 persen.

3.5. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁸. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

PMTB menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Namun secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami perlambatan berangsur-angsur dari 8,08 persen di tahun 2015 menjadi 5,67 di tahun 2019. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi dominan dalam pembentukan modal tetap. Di atas 80 persen PMTB berasal dari sub komponen bangunan. Proporsinya cukup stabil di sekitar angka 82-84 persen selama 4 tahun dan meningkat menjadi 85,36 persen di tahun 2019, sedangkan sisanya adalah sub komponen non bangunan. Pertumbuhan "riil" sub komponen bangunan sedikit meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2015 pertumbuhannya masih 7,97 persen, sedangkan di tahun 2019 ini menjadi 7,98 persen. Sementara itu sub komponen non bangunan tumbuh melambat bahkan mengalami kontraksi di tahun 2019 hingga -6,03 persen.

⁶ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

⁷ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

⁸ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Tabel 3.13 Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 – 2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	125.989,17	141.414,70	157.246,49	171.943,70	188.411,40
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	96.963,27	103.857,19	112.387,27	118.819,80	125.557,71
Proporsi terhadap PDRB (%)	37,01	37,50	37,84	37,24	37,33
Struktur PMTB⁹					
a. Bangunan (Miliar Rp)	103.490,93	116.067,02	129.754,09	143.884,18	160.818,77
(%)	82,14	82,08	82,52	83,68	85,36
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	22.498,24	25.347,69	27.492,41	28.059,52	27.592,63
(%)	17,86	17,92	17,48	16,32	14,64
Total PMTB (Miliar Rp)	125.989,17	141.414,70	157.246,49	171.943,70	188.411,40
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)¹⁰					
a. Bangunan	7,97	7,16	8,69	7,39	7,98
b. Non Bangunan	8,61	6,87	6,06	-1,99	-6,03
Total PMTB	8,08	7,11	8,21	5,72	5,67

Catatan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Melambatnya pertumbuhan PMTB ini tidak berarti bahwa iklim investasi baik bangunan maupun non bangunan sedang lesu. Namun, karena pembangunan telah berjalan sekian lama dan telah terbentuk berbagai aset hasil investasi, maka kebutuhan untuk peningkatan investasi pada kelompok tertentu tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa PMTB ini berkembang sesuai dengan pola kebutuhan pembangunan.

3.6. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.14 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 – 2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	5.641,24	4.848,29	1.821,01	2.422,13	289,52
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	4.659,78	3.330,64	1.388,36	1.362,98	332,04
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,66	1,29	0,44	0,52	0,06

Catatan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2015-2019 perubahan inventori bernilai, hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2015-2019 nilai persediaan pada tahun tersebut bertambah atau dengan kata lain, nilai persediaan akhir tahun lebih besar dibandingkan nilai persediaan di awal tahun selama 5 tahun terakhir.

3.7. PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 3.15 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 - 2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
Total Nilai Ekspor LN					
a. ADHB (Miliar Rp)	20.159,34	17.850,66	18.207,51	23.648,31	25.109,98
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	16.703,58	13.095,03	12.948,17	15.893,52	17.545,19
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	5,92	4,73	4,38	5,12	4,97
Struktur Ekspor LN¹¹					
a. Barang (Miliar Rp)	19.305,53	17.004,36	17.311,86	22.698,86	24.080,02
(%)	95,76	95,26	95,08	95,99	95,90
b. Jasa (Miliar Rp)	853,82	846,31	895,65	949,44	1.029,96
(%)	4,24	4,74	4,92	4,01	4,10
Total ekspor LN	20.159,34	17.850,66	18.207,51	23.648,31	25.109,98
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan¹²					
a. Barang (%)	-8,03	-22,19	-1,39	23,69	10,55
b. Jasa (%)	7,17	-5,45	5,02	2,65	6,43
Total ekspor LN	-7,57	-21,60	-1,12	22,75	10,39

Catatan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, nilai ekspor barang dan jasa luar negeri Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Namun di tahun 2019 ini tampaknya terjadi perbaikan iklim perdagangan luar negeri. Ekspor barang dan jasa meningkat setelah beberapa tahun sebelumnya yang mengalami penurunan. Kontribusi total nilai ekspor luar negeri terhadap PDRB juga meningkat setelah beberapa tahun sebelumnya menurun.

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor luar negeri Sulawesi Selatan berupa barang (rata-rata 96 persen), dan sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Total ekspor barang dan jasa luar negeri Sulawesi Selatan tumbuh positif setelah mengalami kontraksi di tiga tahun terakhir, khususnya di tahun 2016 kontraksi terjadi cukup dalam hingga 21,60 persen. Tajamnya penurunan ekspor barang dan jasa luar negeri tersebut disebabkan adanya penurunan volume ekspor dalam bentuk barang dan dampak dari perekonomian global.

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

Pertumbuhan ekspor barang luar negeri searah dengan pertumbuhan ekspor total barang dan jasa karena kontribusinya yang besar. Ekspor barang tahun 2019 tumbuh positif hingga 10,55 persen. Sedangkan pertumbuhan ekspor jasa luar negeri juga memiliki pola yang sama dengan total ekspor barang dan jasa meskipun persentasenya yang kecil. Di tahun 2019 ekspor jasa tumbuh positif sebesar 6,43 persen.

3.8. PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Sulawesi Selatan. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan ketergantungan Sulawesi Selatan terhadap ekonomi atau produk negara lain semakin berkurang. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Sulawesi Selatan di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 3.16 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 - 2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
Total Nilai Impor LN					
a. ADHB (Miliar Rp)	13.365,44	12.998,05	16.153,14	12.254,65	12.713,74
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	10.240,27	10.023,62	12.400,75	8.189,25	8.055,90
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	3,93	3,45	3,89	2,65	2,52
Struktur Impor LN¹³					
a. Barang (Miliar Rp)	12.677,69	12.241,56	15.464,69	11.324,29	11.505,87
(%)	94,85	94,18	95,74	92,41	90,50
b. Jasa (Miliar Rp)	687,75	756,49	688,45	930,35	1.207,87
(%)	5,15	5,82	4,26	7,59	9,50
Total impor LN	13.365,44	12.998,05	16.153,14	12.254,65	12.713,74
(%)	100	100	100	100	100
Pertumbuhan¹³					
a. Barang (%)	29,80	-2,62	25,64	-35,53	-3,58
b. Jasa (%)	3,87	9,12	-14,66	11,98	31,27
Total impor LN	28,43	-2,12	23,72	-33,96	-1,63

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)
¹⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

Tabel 3.16 di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Sulawesi Selatan pada periode tahun 2015 - 2019 mengalami fluktuasi (baik adhb maupun adhk 2010). Dalam rentang waktu ini impor luar negeri adhb tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp 16,15 triliun, dan terendah di tahun 2018 sebesar Rp 12,25 triliun. Begitu pula untuk total nilai impor luar negeri adhk 2010, tertinggi pada tahun 2017 yaitu Rp 12,4 triliun dan terendah pada tahun 2019 yaitu Rp 8,06 triliun. Apabila dibandingkan kondisi 4 tahun sebelumnya, nilai impor luar negeri menurut harga berlaku maupun harga konstan menurun.

Proporsi impor barang dan jasa luar negeri tergolong kecil dan cukup stabil sekitar 3 persen selama kurun waktu 2015 – 2019. Proporsi impor luar negeri ini lebih kecil daripada ekspor luar negeri, sehingga perdagangan luar negeri Sulawesi Selatan masih mengalami surplus. Yang diharapkan adalah semakin meningkatnya ekspor dan menurunnya impor.

Sejalan dengan total nilai impor barang dan jasa luar negeri, pertumbuhan riil nilai impor barang dan jasa luar negeri dari tahun ke tahun di Sulawesi Selatan juga sangat fluktuatif. Pada tahun 2015 impor luar negeri tumbuh hingga 28,43 persen dan kondisi 2019 impor luar negeri kontraksi sebesar 1,63 persen. Dalam waktu 5 tahun tersebut, impor luar negeri mengalami kontraksi tiga kali yaitu di tahun 2016, 2018 dan 2019.

Sebagaimana ekspor, produk impor luar negeri dari tahun ke tahun juga didominasi oleh produk barang dengan porsi rata-rata sekitar 93,54 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa.

3.9. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut.

Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar wilayah menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

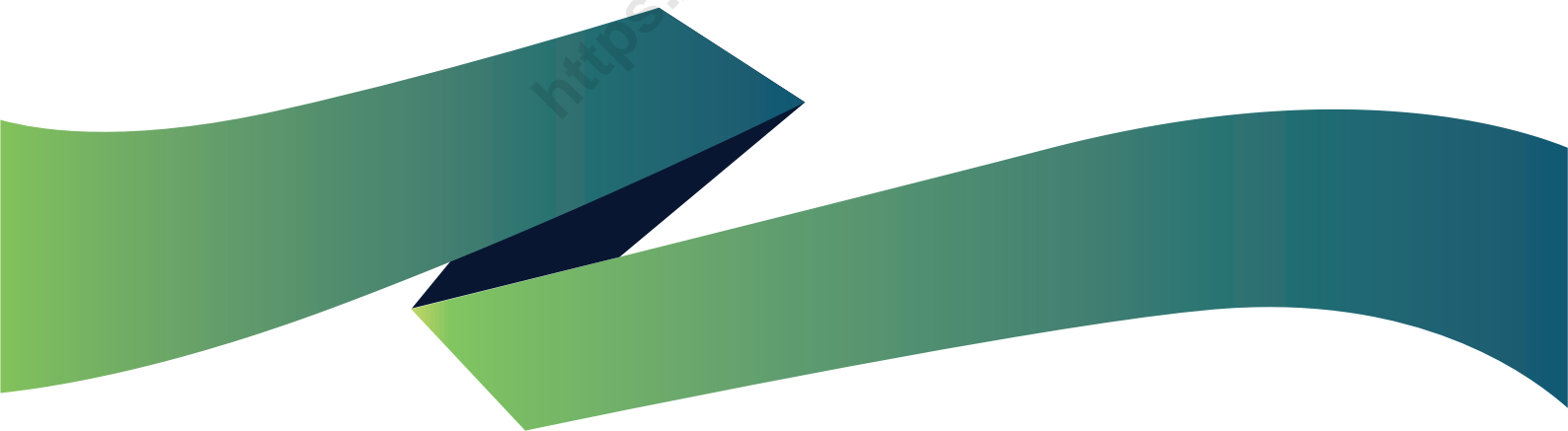
Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode cross hauling. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode cross-hauling diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel *Input-Output* “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan demand dan *supply* suatu perekonomian.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB 4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
MENURUT PENGELUARAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2015-2019



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://sulsel.bps.go.id>

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 - 2019

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015–2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	340.390,21	377.108,91	415.588,20	461.719,49	504.746,87
- ADHK 2010	250.802,99	269.401,31	288.814,17	309.202,40	330.605,13
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	39.950,48	43.817,39	47.822,11	52.635,78	57.025,55
- ADHK 2010	29.435,92	31.302,53	33.234,11	35.248,91	37.351,28
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	6,08	6,34	6,17	6,06	5,96
Jumlah penduduk (ribu orang)	8.520	8.606	8.690	8.772	8.851
Pertumbuhan	1,05	1,01	0,98	0,94	0,90

Catatan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Dari indikator ini dapat diketahui bahwa secara rata-rata penduduk Sulawesi Selatan di tahun 2019 mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar Rp 57,03 juta.

Jumlah penduduk meningkat rata-rata pada kisaran 0,97 persen setiap tahunnya. Sementara itu pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 5 hingga 6 persen. Dengan demikian pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan selalu diikuti dengan peningkatan kualitas perekonomian, meskipun peningkatan ekonomi tersebut belum dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

4.2. PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Sulawesi Selatan (sekitar 54 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Sulawesi Selatan sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 4.2 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2015 – 2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	185.585,54	204.368,75	225.404,55	251.147,50	274.463,64
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	73.410,42	50.899,09	41.861,74	43.309,48	44.211,84
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	2,53	4,02	5,38	5,80	6,21

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 2,53 kali dari yang diekspor. Sementara itu tahun 2019, konsumsi rumah tangga menjadi 6,21 kali lebih besar dibandingkan ekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Peningkatan rasio yang relatif tajam pada tahun 2016 (4,02) disebabkan karena penurunan nilai ekspor yang cukup tajam, sementara sebaliknya konsumsi rumah tangga justru meningkat. Pola konsumsi rumah tangga senantiasa meningkat setiap tahun, sedangkan pola ekspor barang dan jasa fluktuatif. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga.

4.3. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Sulawesi Selatan digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2015 – 2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	185.585,54	204.368,75	225.404,55	251.147,50	274.463,64
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	125.989,17	141.414,70	157.246,49	171.943,70	188.411,40
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,47	1,45	1,43	1,46	1,46

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB dalam kurun 2015-2019 relatif stabil dengan rata-rata 1,45. Hal ini berarti bahwa konsumsi rumah tangga masih lebih besar dibandingkan investasi asset tetap sebesar 1,45 kali lipat. Nilai investasi maupun nilai konsumsi rumah tangga memiliki pola yang sama-sama meningkat.

4.4. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.4 Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 – 2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	185.585,54	204.368,75	225.404,55	251.147,50	274.463,64
b. LNPRT	4.265,90	4.626,45	5.109,72	6.145,46	8.699,58
c. Pemerintah	36.396,62	37.399,19	39.393,17	44.827,51	49.429,29
J u m l a h	226.248,06	246.394,40	269.907,45	302.120,47	332.592,51
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	340.390,21	377.108,91	415.588,20	461.719,49	504.746,87
Proporsi	66,47	65,34	64,95	65,43	65,89

Catatan: *) angka sementara

***) angka sangat sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi. Proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Tahun 2015-2019 proporsinya berkisar antar 64 – 67 persen. Artinya produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) masih memiliki peran yang relatif kecil.

4.5. PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah sendiri, tetapi diperdagangkan baik ke luar daerah ataupun ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 4.5 Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2015 – 2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Luar Negeri	20.159,34	17.850,66	18.207,51	23.648,31	25.109,98
b. Antar Daerah	53.251,07	33.048,42	23.654,23	19.661,17	19.101,86
Total	73.410,42	50.899,09	41.861,74	43.309,48	44.211,84
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	125.989,17	141.414,70	157.246,49	171.943,70	188.411,40
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0,58	0,36	0,27	0,25	0,23

Catatan: *) angka sementara

***) angka sangat sementara

Ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan lebih didominasi oleh ekspor antar daerah, meskipun dalam dua tahun terakhir ekspor luar negeri lebih dominan. Dalam kurun waktu 2015-2019 nilai ekspor lebih rendah dari PMTB (tabel 21) dan rasionya cenderung semakin rendah. Produk yang diekspor di tahun 2015 sebesar 58 persen dari produk yang diinvestasikan secara fisik, sedangkan di tahun 2019 produk yang diekspor menurun menjadi 23 persen dari produk yang diinvestasikan secara fisik. Pola ekspor mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir, tentunya pengaruh dari volume produksi kegiatan usaha. Sementara itu PMTB terus meningkat dari tahun ke tahun, terlihat dari giatnya pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.

4.6. PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain maupun negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 4.6 Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	340.390,21	377.108,91	415.588,20	461.719,49	504.746,87
Impor (ADHB) (Miliar Rp)					
a.Luar Negeri	13.365,44	12.998,05	16.153,14	12.254,65	12.713,74
b.Antar Daerah	77.533,24	53.449,52	39.095,34	45.821,65	48.044,66
Total	90.898,68	66.447,57	55.248,48	58.076,29	60.758,40
Rasio PDRB terhadap Impor	3,74	5,68	7,52	7,95	8,31

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2015 - 2019 menunjukkan peningkatan dari 3,74 di tahun 2015 menjadi 8,31 di tahun 2019, yang artinya selama periode tersebut ketergantungan PDRB Sulawesi Selatan terhadap produk impor semakin berkurang. Sebagaimana ekspor, impor di Sulawesi Selatan juga didominasi oleh impor dari provinsi lain, yaitu di atas 70 persen dari total impornya. Selama 5 tahun ini pola impor luar negeri dan impor antar daerah mengalami fluktuasi.

4.7. KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah terhadap produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 4.7 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 – 2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
Total Penyediaan PDRB (ADHB)					
(Miliar Rp)	340.390,21	377.108,91	415.588,20	461.719,49	504.746,87
%	78,92	85,02	88,27	88,83	89,26
Total nilai Impor ADHB					
(Miliar Rp)	90.898,68	66.447,57	55.248,48	58.076,29	60.758,40
%	21,08	14,98	11,73	11,17	10,74
Total Permintaan Akhir¹⁵					
(Miliar Rp)	431.288,89	443.556,48	470.836,68	519.795,78	565.505,27
%	100	100	100	100	100

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar (luar negeri dan wilayah lain), sekitar 10-21 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 78-89 persen dari hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus

¹⁵ Termasuk diskrepansi statistik

meningkat setiap tahunnya, dari Rp 431,29 triliun di tahun 2014 menjadi sebesar Rp 565,51 triliun di tahun 2018.

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik selama kurun waktu lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan yang terus meningkat, maka berbagai produk barang dan jasa perlu diimpor. Namun persentase impor terhadap permintaan akhir ini ada kecenderungan menurun, sehingga pada tahun 2019 hanya sekitar 11 persen barang dan jasa yang diimpor atau senilai Rp 60,76 triliun.

4.8. NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar wilayah dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 4.8 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	73.410,42	50.899,09	41.861,74	43.309,48	44.211,84
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	90.898,68	66.447,57	55.248,48	58.076,29	60.758,40
Net Ekspor (X - M) (Miliar Rp)	-17.488,26	-15.548,48	-13.386,74	-14.766,81	-16.546,56
Rasio Ekspor terhadap Impor	0,81	0,77	0,76	0,75	0,73

Catatan: *) angka sementara

***) angka sangat sementara

Selama periode 2015 - 2019, posisi perdagangan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Selatan dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Selatan selalu dalam posisi defisit. Penyebab nilai posisi defisit dikarenakan dominasi nilai impor antar wilayah yang selalu lebih besar dari nilai ekspor antar wilayah. Sebaliknya, nilai ekspor luar negeri lebih besar dari impor luar negeri menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “tabungan luar negeri”. Namun karena net ekspor antar wilayah/daerah mempunyai nilai yang lebih besar dari ekspor luar negeri maka posisi neraca perdagangan Sulawesi Selatan menjadi defisit. Defisit perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yang terjadi antara tahun 2015 sampai dengan 2019 berfluktuasi, angka terendah di tahun 2015 yakni minus Rp 17,49 juta, dan angka tertinggi di tahun 2017 yakni minus Rp 13,39 juta. Gap antara ekspor dan impor ini masih cukup jauh sehingga memerlukan upaya yang besar dan waktu yang panjang untuk dapat menjadikan neraca perdagangan Sulawesi Selatan pada posisi balance atau surplus. Karena lebih dominannya nilai impor dibandingkan ekspor, maka rasio ekspor terhadap impor masih di bawah 1 dari tahun 2015 - 2019.

4.9. RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d + 1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI bernilai minus, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila bernilai positif, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Tabel 4.9 Rasio Perdagangan Internasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 - 2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	20.159,34	17.850,66	18.207,51	23.648,31	25.109,98
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	13.365,44	12.998,05	16.153,14	12.254,65	12.713,74
(X - M) (Miliar Rp)	6.793,91	4.852,61	2.054,37	11.393,66	12.396,24
(X +M) (Miliar Rp)	33.524,78	30.848,71	34.360,65	35.902,95	37.823,72
RPI	0,20	0,16	0,06	0,32	0,33

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015 - 2019, posisi ekspor luar negeri selalu lebih tinggi dari impor luar negeri. Ekspor dan impor luar negeri pada periode tersebut cukup fluktuatif. Perkembangan ekspor selama 5 tahun terakhir lebih pesat dibandingkan perkembangan impor.

Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2015 - 2019 mengindikasikan bahwa perdagangan internasionalnya selalu didominasi oleh kegiatan ekspor dengan rasio yang selalu positif. Peningkatan Rasio Perdagangan Internasional di tahun 2019 sebesar 0,33 poin, dan diharapkan akan semakin meningkat di tahun-tahun yang akan datang.

4.10. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Keterangan:

I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 4.10 *Incremental Capital Output Ratio, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015 - 2019*

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar rupiah)	250.802,99	269.401,31	288.814,17	309.202,40	330.605,13
Perubahan (Miliar rupiah)	16.814,94	18.598,32	19.412,86	20.388,23	21.402,73
PMTB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	96.963,27	103.857,19	112.387,27	118.819,80	125.557,71
ICOR	5,77	5,58	5,79	5,83	5,87

Catatan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR memiliki kecenderungan naik dari 2015 hingga 2019, tetapi sempat menurun pada tahun 2016. Nilai ICOR tahun 2019 telah mencapai 5,87 yang berarti bahwa setiap penambahan 1 nilai output membutuhkan penambahan kapital sebanyak 5,87. Sehingga untuk penambahan output 1 miliar rupiah, dibutuhkan penambahan modal 5,87 miliar rupiah.

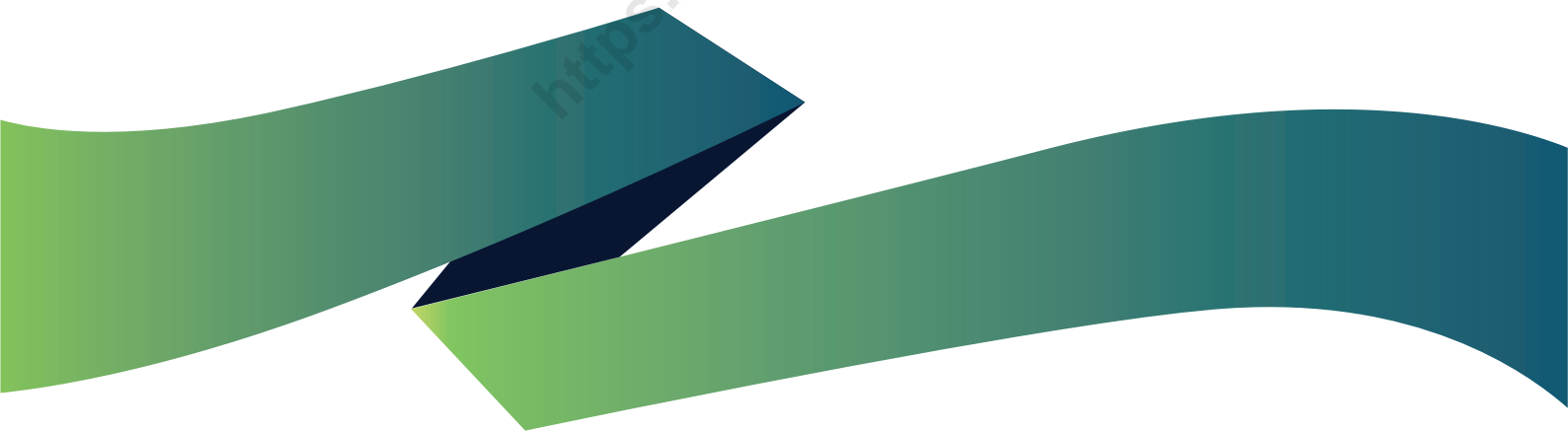
Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB 5

PENUTUP

<https://sulsel.bps.go.id>



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://sulsel.bps.go.id>

PENUTUP

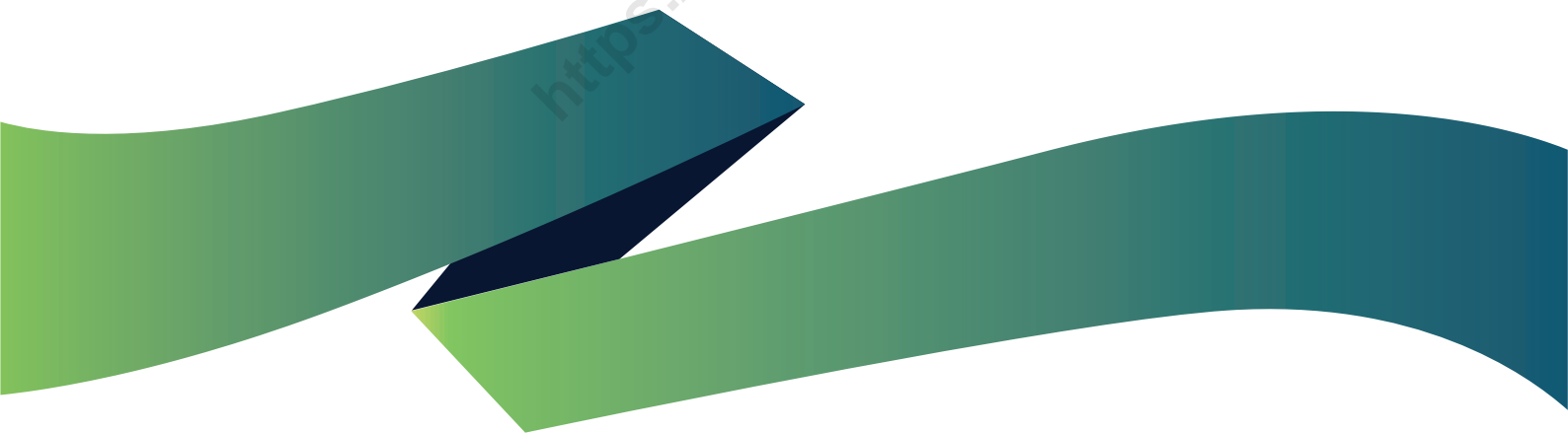
1. PDRB menurut penggunaan tahun 2015 - 2019 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti jumlah penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2015 - 2019, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel *Input-Output*, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, yaitu ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://sulsel.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

<https://sulsel.bps.go.id>



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://sulsel.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

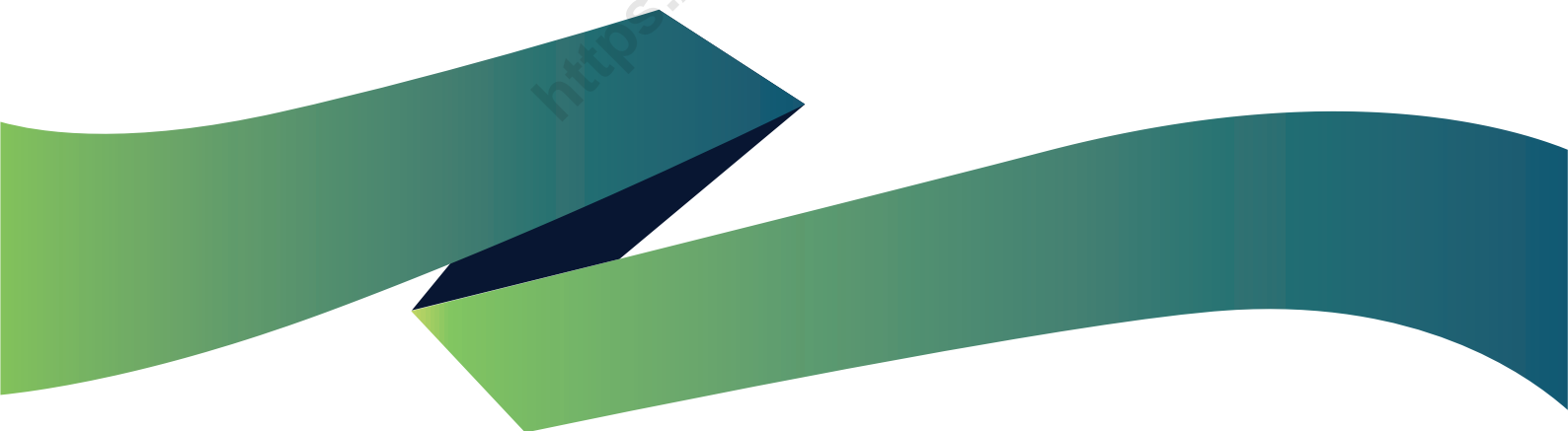
1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. Badan Pusat Statistik, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. Badan Pusat Statistik, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. Badan Pusat Statistik, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
5. Badan Pusat Statistik, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. Badan Pusat Statistik, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. Badan Pusat Statistik, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. Badan Pusat Statistik, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. Badan Pusat Statistik, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
11. Badan Pusat Statistik, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Sulawesi Selatan*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts, Studies in Methods*, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
16. United Nations, *Input-Output Table and Analysis, Studies in Methods*, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
17. United Nations, *Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods*, Series F No. 39, New York, 1986.
18. United Nations, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 50, New York, 1988.
19. United Nations, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://sulsel.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://sulsel.bps.go.id>



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://sulsel.bps.go.id>

LAMPIRAN 1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	185.585.543,03	204.368.749,91	225.404.554,58	251.147.504,70	274.463.638,68
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	80.939.204,40	91.004.619,41	100.713.193,07	111.727.483,64	123.691.230,55
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	8.865.255,41	9.797.581,92	10.706.019,71	11.832.823,61	12.872.102,68
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	17.791.333,17	19.419.884,44	21.428.012,84	23.522.175,60	24.720.937,38
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	19.107.893,39	20.785.235,19	22.828.847,85	26.446.640,47	28.775.905,00
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	40.639.102,66	43.150.366,98	47.778.197,20	53.492.234,82	58.726.097,97
1.f. Hotel dan Restoran	9.947.530,55	11.037.685,53	11.924.461,88	13.237.896,91	13.573.973,58
1.g. Lainnya	8.295.223,45	9.173.376,45	10.025.822,03	10.888.249,65	12.103.391,53
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.265.898,95	4.626.454,99	5.109.718,09	6.145.458,59	8.699.582,15
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	36.396.615,59	37.399.191,96	39.393.172,37	44.827.507,85	49.429.293,61
3.a. Konsumsi Kolektif	20.524.652,19	20.987.026,71	21.985.562,85	25.160.334,57	27.381.729,47
3.b. Konsumsi Individu	15.871.963,40	16.412.165,25	17.407.609,51	19.667.173,29	22.047.564,13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	125.989.169,84	141.414.703,54	157.246.493,31	171.943.698,35	188.411.404,02
4.a. Bangunan	103.490.925,13	116.067.016,20	129.754.085,42	143.884.182,96	160.818.770,21
4.b. Non-Bangunan	22.498.244,71	25.347.687,34	27.492.407,88	28.059.515,39	27.592.633,81
5. Perubahan Inventori	5.641.243,76	4.848.290,45	1.821.005,35	2.422.131,60	289.515,38
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	20.159.344,79	17.850.664,85	18.207.506,18	23.648.308,13	25.109.979,04
6.a. Barang	19.305.526,67	17.004.359,69	17.311.858,12	22.698.863,38	24.080.022,68
6.b. Jasa	853.818,13	846.305,16	895.648,06	949.444,74	1.029.956,35
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	13.365.439,39	12.998.049,89	16.153.140,60	12.254.645,24	12.713.738,28
7.a. Barang	12.677.686,97	12.241.555,99	15.464.689,14	11.324.291,84	11.505.871,64
7.b. Jasa	687.752,42	756.493,91	688.451,46	930.353,39	1.207.866,63
8. Net Ekspor Antar Daerah	-24.282.162,31	-20.401.099,27	-15.441.108,28	-26.160.476,13	-28.942.801,45
PDRB	340.390.214,27	377.108.906,54	415.588.200,98	461.719.487,85	504.746.873,15

Catatan: *) angka sementara

***) angka sangat sementara

LAMPIRAN 2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*)	2019**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	134.421.200,87	141.791.483,16	150.507.106,47	160.726.177,62	171.693.402,60
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	60.089.850,11	63.320.761,47	66.970.550,62	71.730.322,70	77.007.697,35
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5.905.895,53	6.200.617,06	6.615.228,64	6.914.836,94	7.104.486,21
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12.361.764,00	12.983.444,61	13.736.121,19	14.398.860,84	14.829.494,73
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	13.159.107,04	13.773.922,75	14.724.943,86	15.897.536,71	16.811.952,99
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	30.527.617,11	32.389.383,64	34.638.623,13	37.370.792,66	41.105.335,48
1.f. Hotel dan Restoran	6.778.720,75	7.258.771,04	7.653.607,20	7.985.590,77	7.966.342,38
1.g. Lainnya	5.598.246,32	5.864.582,61	6.168.031,82	6.428.236,99	6.868.093,46
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.950.591,29	3.046.761,72	3.254.762,59	3.764.853,82	5.114.633,07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	25.407.420,98	25.066.638,57	25.746.955,19	27.346.386,12	29.251.408,64
3.a. Konsumsi Kolektif	14.655.992,19	14.424.289,79	14.811.236,72	15.862.938,09	16.647.373,08
3.b. Konsumsi Individu	10.751.428,79	10.642.348,78	10.935.718,47	11.483.448,03	12.604.035,55
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	96.963.272,05	103.857.187,87	112.387.271,77	118.819.795,13	125.557.714,35
4.a. Bangunan	79.367.448,06	85.052.586,94	92.443.875,93	99.273.903,27	107.191.417,03
4.b. Non-Bangunan	17.595.823,99	18.804.600,93	19.943.395,85	19.545.891,86	18.366.297,32
5. Perubahan Inventori	4.659.781,01	3.330.639,60	1.388.360,43	1.362.981,61	332.042,20
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	16.703.581,96	13.095.028,50	12.948.166,34	15.893.515,18	17.545.185,12
6.a. Barang	16.116.858,98	12.540.286,49	12.365.575,16	15.295.484,09	16.908.722,64
6.b. Jasa	586.722,98	554.742,00	582.591,18	598.031,09	636.462,48
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	10.240.267,09	10.023.622,52	12.400.752,81	8.189.247,90	8.055.901,37
7.a. Barang	9.800.642,96	9.543.914,31	11.991.379,78	7.730.826,59	7.454.112,63
7.b. Jasa	439.624,13	479.708,21	409.373,03	458.421,31	601.788,74
8. Net Ekspor Antar Daerah	-20.062.588,01	-10.762.803,44	-5.017.698,87	-10.522.059,11	-10.833.352,00
PDRB	250.802.993,05	269.401.313,45	288.814.171,11	309.202.402,47	330.605.132,61

Catatan: *) angka sementara

***) angka sangat sementara

LAMPIRAN 3

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019

Komponen Pengeluaran (1)	(Persen)				
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	54,52	54,19	54,24	54,39	54,38
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	23,78	24,13	24,23	24,20	24,51
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,60	2,60	2,58	2,56	2,55
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,23	5,15	5,16	5,09	4,90
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,61	5,51	5,49	5,73	5,70
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,94	11,44	11,50	11,59	11,63
1.f. Hotel dan Restoran	2,92	2,93	2,87	2,87	2,69
1.g. Lainnya	2,44	2,43	2,41	2,36	2,40
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,25	1,23	1,23	1,33	1,72
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	10,69	9,92	9,48	9,71	9,79
3.a. Konsumsi Kolektif	6,03	5,57	5,29	5,45	5,42
3.b. Konsumsi Individu	4,66	4,35	4,19	4,26	4,37
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	37,01	37,50	37,84	37,24	37,33
4.a. Bangunan	30,40	30,78	31,22	31,16	31,86
4.b. Non-Bangunan	6,61	6,72	6,62	6,08	5,47
5. Perubahan Inventori	1,66	1,29	0,44	0,52	0,06
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	5,92	4,73	4,38	5,12	4,97
6.a. Barang	5,67	4,51	4,17	4,92	4,77
6.b. Jasa	0,25	0,22	0,22	0,21	0,20
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	3,93	3,45	3,89	2,65	2,52
7.a. Barang	3,72	3,25	3,72	2,45	2,28
7.b. Jasa	0,20	0,20	0,17	0,20	0,24
8. Net Ekspor Antar Daerah	-7,13	-5,41	-3,72	-5,67	-5,73
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

LAMPIRAN 4

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019

Komponen Pengeluaran (1)	(Persen)				
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	5,29	5,48	6,15	6,79	6,82
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	5,03	5,38	5,76	7,11	7,36
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,83	4,99	6,69	4,53	2,74
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,92	5,03	5,80	4,82	2,99
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,59	4,67	6,90	7,96	5,75
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,58	6,10	6,94	7,89	9,99
1.f. Hotel dan Restoran	6,48	7,08	5,44	4,34	-0,24
1.g. Lainnya	4,62	4,76	5,17	4,22	6,84
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,13	3,26	6,83	15,67	35,85
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	8,09	-1,34	2,71	6,21	6,97
3.a. Konsumsi Kolektif	6,87	-1,58	2,68	7,10	4,95
3.b. Konsumsi Individu	9,81	-1,01	2,76	5,01	9,76
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	8,08	7,11	8,21	5,72	5,67
4.a. Bangunan	7,97	7,16	8,69	7,39	7,98
4.b. Non-Bangunan	8,61	6,87	6,06	-1,99	-6,03
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-7,57	-21,60	-1,12	22,75	10,39
6.a. Barang	-8,03	-22,19	-1,39	23,69	10,55
6.b. Jasa	7,17	-5,45	5,02	2,65	6,43
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	28,43	-2,12	23,72	-33,96	-1,63
7.a. Barang	29,80	-2,62	25,64	-35,53	-3,58
7.b. Jasa	3,87	9,12	-14,66	11,98	31,27
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB	7,19	7,42	7,21	7,06	6,92

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

LAMPIRAN 5

Indeks harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019

Komponen Pengeluaran (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	138,06	144,13	149,76	156,26	159,86
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	134,70	143,72	150,38	155,76	160,62
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	150,11	158,01	161,84	171,12	181,18
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	143,92	149,57	156,00	163,36	166,70
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	145,21	150,90	155,04	166,36	171,16
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	133,12	133,22	137,93	143,14	142,87
1.f. Hotel dan Restoran	146,75	152,06	155,80	165,77	170,39
1.g. Lainnya	148,18	156,42	162,54	169,38	176,23
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	144,58	151,85	156,99	163,23	170,09
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	143,25	149,20	153,00	163,92	168,98
3.a. Konsumsi Kolektif	140,04	145,50	148,44	158,61	164,48
3.b. Konsumsi Individu	147,63	154,22	159,18	171,27	174,92
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	129,93	136,16	139,91	144,71	150,06
4.a. Bangunan	130,39	136,47	140,36	144,94	150,03
4.b. Non-Bangunan	127,86	134,80	137,85	143,56	150,24
5. Perubahan Inventori	121,06	145,57	131,16	177,71	87,19
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	120,69	136,32	140,62	148,79	143,12
6.a. Barang	119,78	135,60	140,00	148,40	142,41
6.b. Jasa	145,52	152,56	153,74	158,76	161,83
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	130,52	129,67	130,26	149,64	157,82
7.a. Barang	129,36	128,27	128,97	146,48	154,36
7.b. Jasa	156,44	157,70	168,17	202,95	200,71
8. Net Ekspor Antar Daerah	121,03	189,55	307,73	248,63	267,16
PDRB	135,72	139,98	143,89	149,33	152,67

Catatan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

LAMPIRAN 6

Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019

(Persen)

Komponen Pengeluaran (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018*) (5)	2019**) (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	6,41	4,40	3,91	4,34	2,30
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	6,49	6,70	4,64	3,57	3,12
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	6,78	5,26	2,42	5,74	5,88
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,71	3,93	4,29	4,72	2,04
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	8,04	3,92	2,74	7,30	2,89
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,53	0,08	3,54	3,77	-0,19
1.f. Hotel dan Restoran	7,51	3,62	2,46	6,40	2,79
1.g. Lainnya	8,76	5,56	3,92	4,21	4,04
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,17	5,03	3,39	3,97	4,20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	5,97	4,15	2,55	7,14	3,08
3.a. Konsumsi Kolektif	5,90	3,90	2,02	6,85	3,70
3.b. Konsumsi Individu	5,97	4,46	3,22	7,59	2,14
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	5,75	4,79	2,76	3,43	3,70
4.a. Bangunan	5,51	4,66	2,85	3,26	3,51
4.b. Non-Bangunan	6,90	5,42	2,27	4,14	4,65
5. Perubahan Inventori	-24,18	20,24	-9,90	35,49	-50,94
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	0,40	12,95	3,16	5,81	-3,81
6.a. Barang	0,06	13,20	3,25	6,00	-4,04
6.b. Jasa	6,92	4,83	0,77	3,27	1,93
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	-5,06	-0,65	0,45	14,88	5,46
7.a. Barang	-5,73	-0,84	0,55	13,58	5,38
7.b. Jasa	10,27	0,80	6,64	20,68	-1,10
8. Net Ekspor Antar Daerah	1,02	56,61	62,35	-19,21	7,46
PDRB	6,55	3,14	2,80	3,77	2,24

Catatan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://sulsel.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jl. H. Bau No. 6, Makassar, 90125
Telp.: (0411) 854838, Fax: (0411) 85125
Homepage: <http://sulsel.bps.go.id>
E-mail: bps7300@bps.go.id

